

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dari media sosial sungguh pesat, ini bisa di lihat dari banyaknya jumlah anggota yang di miliki masing – masing situs jejaring sosial. Pesatnya perkembangan media sosial tersebut dikarenakan dengan media sosial semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial akan dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya.

Internet bisa dikatakan hanya sebagai medium yang bisa digunakan untuk diskusi atau debat politik, pertukaran ide maupun gagasan, hingga membangun wacana sebagai jawaban terhadap realitas politik. Media sosial Twitter menjadi salah satu yang banyak digunakan orang untuk menyampaikan pendapat dan mempertukarkan ide. Keterlibatan khalayak di media sosial juga telah memberikan pendefinisian ulang mengenai produsen dan konsumen yang selama ini terdikotomi. Sehingga baik-buruk suatu peristiwa dan keberpihakan yang disajikan dan terkandung dalam konten berita ditentukan sepenuhnya oleh warga. (Gurevitch and Blumler, 1990: 273)

Keluarnya ide dan gagasan yang sama dalam twitter dapat membangun sebuah wacana. Ide maupun gagasan mengenai peristiwa yang muncul sebagai akibat dari realitas politik yang terjadi dan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Wacana yang mereka sampaikan diberi tanda tagar (#) atau istilahnya adalah *hashtag*. *Hashtag* adalah kata tanpa spasi yang diawali dengan symbol #.

Hashtag adalah cara kreatif yang dilakukan oleh komunitas Twitter untuk membangun kepedulian kolektif mengenai sebuah isu atau persoalan sosial tertentu. Dalam bahasa Clay Shirky, pakar media sosial dari New York University, *hashtag* memiliki kekuatan ampuh untuk membentuk “*shared awareness*” yang bisa berujung kepada gerakan massa yang kongkrit seperti demonstrasi politik, aksi kepedulian, kampanye sosial, dan sebagainya. Ketika *shared awareness* mengenai suatu isu sosial sudah dirasakan urgensinya oleh masyarakat dan mencapai tipping point-nya, maka viral mengenai isu tersebut akan menjalar dengan cepat dan mengkrystal menjadi gerakan massa dengan skala yang besar. (Yuswohady, 2012 dalam www.yuswohady.com/ diakses 24 Desember 2014 pukul 10.11 WIB)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang begitu cepat membawa perubahan pada banyak hal dalam kehidupan sosial. Salah satunya dalam mendorong gerakan sosial, termasuk misalnya, gerakan “perlawanan”. *Hashtag* atau tanda pagar (#) menjadi alternatif yang cukup efektif untuk menyebarkan gagasan lewat media sosial. Di era internet, lebih-lebih setelah hadirnya media sosial khususnya Twitter, membangun suatu gerakan sosial menjadi lebih mudah, bahkan bisa berbiaya murah. Bandingkan dengan cara-cara konvensional seperti pertemuan langsung, pemasangan pamflet dan spanduk di tempat umum, dan sebagainya yang

membutuhkan biaya cukup besar. Di era media sosial, kendati cara-cara tersebut masih diperlukan tapi setidaknya bisa dikurangi. Penggagas gerakan cukup “bergerilya” lewat media sosial dengan bermodal *hashtag*, biayanya terjangkau dan penyebarannya lebih massif. Salah satu wacana adalah tentang gerakan sosial melalui *hashtag* #ShameOnYouSBY yang muncul sebagai akibat dari disahkannya UU Pilkada Tidak Langsung oleh DPR RI. Dalam pengertian ShameOnYouSBY atau dieja #ShameOnYouSBY adalah tagar yang muncul di dunia maya khususnya di situs jejaring sosial Twitter pada bulan September 2014 tentang kritik masyarakat Indonesia terkait sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika rapat pembahasan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tanggal 24 September 2014.

Dalam rancangan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan oleh rakyat (pemilihan tidak langsung). Dalam proses pemungutan suara (voting) tersebut, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari ruang rapat. Menurut Ketua Umum Partai Nasional Demokrat yang dikutip melalui *www.kompas.com*, Surya Paloh, RUU Pilkada merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh karena itu, Demokrat sebagai partai utama pemerintah seharusnya tidak mengambil sikap *walk out* seperti itu. Sehingga masyarakat pun menyampaikan kritik terhadap hasil sidang tersebut melalui jejaring social baik melalui facebook maupun twitter. Mereka mengungkapkan dengan beragam kritikan, masyarakat menganggap bahwa dengan disahkannya UU Pemilihan Kepala Daerah melalui DPR maupun DPRD dianggap sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia. Di Twitter masyarakat beramai-ramai menggunakan #ShameOnYouSBY untuk mengungkapkan kritiknya terhadap topik yang sama.

Bahkan tweet kritikan dengan *hashtag* #ShameOnYouSBY tersebut secara cepat menjadi trending topic global (seluruh dunia) setelah hanya sekitar dua jam muncul pertama kali sejak jumat pagi 26 September 2014 hingga sabtu malam 27 September 2014, dengan jumlah tweet yang menggunakan tagar ini mencapai jumlah yang cukup fantastis.

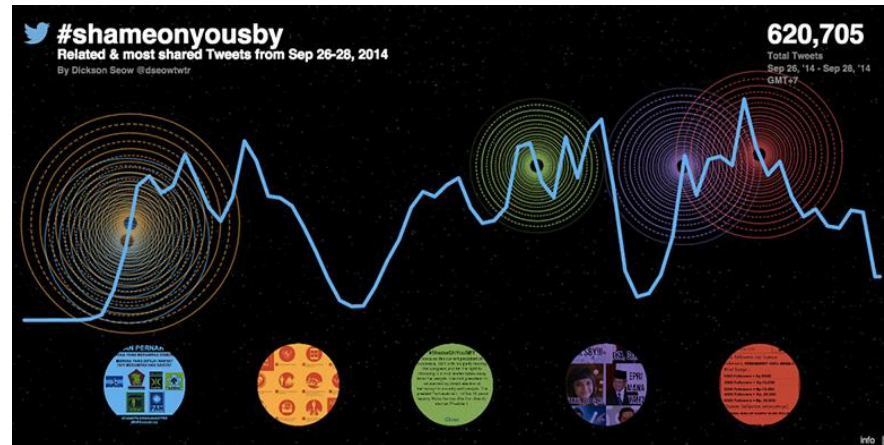
Gambar 1.1 Tampilan Trending Topic Global 27 September 2014



Sumber: <https://twitter.com>

Trend #ShameOnYouSBY terus berkembang, berdasarkan data Twitter, selama periode 26-28 September 2014, #ShameOnYouSBY disebutkan mencapai 620.705 *tweet*. Puncak arus *tweet* terjadi pada Minggu (28/9/2014) siang sekitar pukul 12.30 dengan capaian 306 *tweet* per menit.

Gambar 1.2 Tampilan Persebaran Tweet #ShameOnYouSBY 26-28 September 2014



Namun pada Sabtu malam, tiba-tiba saja #ShameOnYouSBY menghilang dari Twitter. Meskipun saja netizen segera mengganti dengan *hashtag* #ShamedByYou, kemudian diikuti #ShamedByYouAgainSBY dan yang terakhir adalah #WelcomeMrLiar. Yang menarik semua tagar ini langsung menjadi trending topik.

Kemunculan tagar ShameOnYouSBY ini dianggap sebagai kekecewaan masyarakat kepada sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat yang ia pimpin. Dalam *www.metrotvnews.com* pilihan *walk out* yang diambil oleh Partai Demokrat bukanlah atas perintah SBY, melainkan inisiatif ketua fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf. Selain itu, para netizen juga mengkritisi Koalisi Merah Putih yang mendukung Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Sementara itu polemik mengenai hilangnya tagar #ShameOnYouSBY masih menyisakan pertanyaan, meskipun dalam pernyataan resminya pihak Twitter menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak ikut campur dalam hilangnya tagar tersebut. Namun disisi lain, menurut Nancy Messieh dikutip dari *The Next Web*, Twitter menyatakan dapat menghapus atau mempertahankan suatu konten di situs

mereka. Hal tersebut dilakukan jika ada permintaan khusus dari pemerintah suatu negara. *The Next Web* menyebutkan, Twitter tidak akan menerapkan sistem sensor otomatis. Tapi praktik tersebut bisa dilaksanakan jika ada permintaan resmi dari pihak yang berwenang. Kondisi itu telah tertulis dalam kebijakan Twitter dalam situs mereka. Jika pemerintah atau lembaga negara tertentu mengajukan keberatan terhadap kicauan, konten atau akun tertentu, bila dianggap memenuhi aturan maka pengelola akan menghapus, meredam atau menahan akses terhadap konten tersebut. (Nancy Messieh, 2012 <http://thenextweb.com/twitter/2012/01/27/twitter-isnt-censoring-you-your-government-is/> diakses 23 Desember 2014 pukul 12.19 WIB)

Kondisi ini bisa saja mereka lakukan terhadap *hashtag* #ShameOnYouSBY. Dalam hal ini, Twitter bisa saja berdalih tidak menyensor #ShameOnYouSBY, tapi atas permintaan pemerintah Indonesia *hashtag* dihilangkan dari trending topik global. Hal ini merujuk pada apa yang disampaikan Tifatul Sembiring (Menkominfo Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2) yang saat itu masih menjabat, melalui akun twitternya ia menyampaikan sindiran mengenai *hashtag-hashtag* yang menyerang SBY pada minggu 28 September 2014. Seperti beberapa kicauan Tifatul di Twitter yang memberikan tanggapan mengenai hal ini. Dalam tweet-nya, Menteri Tifatul yang ditulis melalui akun pribadinya @tifsembiring pada 28 September 2014 silam, seolah melemparkan wacana untuk memblokir Twitter "*Twitter adlh situs dg nama domain tunggal twitter(dot)com. Jadi pilihan Pemerintah hanya 2, twitter BOLEH atau TIDAK*" kemudian diikuti tweet yang meminta pendapat dari netizen soal wacana penutupan Twitter "*Beberapa negara spt Turki, Arab Saudi, Mesir pernah menutup twitter. Indonesia belum pernah menutup Twitter. Ada usulan?,"*selanjutnya ia menanggapi mengenai trending topic yang sedang populer akibat adanya *hashtag*

#ShameOnYouSBY "*Hampir tidak ada pemerintahan yg bisa mengontrol Twitter, termasuk USA. Apalagi hanya urusan TT yg digemari anak2 yg belum akil baligh ini,*" dia memberikan data mengenai pengguna Twitter di Indonesia "*Salah satu survey mengatakan 64% pengguna Twitter di Indonesia adlh remaja 11 s/d 14 thn, banyak yg belum akil baligh....:))*". Bisa jadi apa yang disampaikan Tifatul ini merujuk pada turut serta pemerintah terhadap hilangnya *hashtag*#ShameOnYouSBY.

Sementara itu terdapat pula wacana tentang gerakan sosial *hashtag* #UsirFlorenceDariJogja yang muncul sebagai akibat dari kasus yang menimpa mahasiswi UGM ketika ekspresi kemarahannya di *Path* menimbulkan SARA. Foto hasil *screenshot* yang disebarluaskan temannya melalui twitter inilah menjadi sebuah bahan diskusi dan debat yang berkepanjangan. Sehingga menimbulkan aksi *bullying* terhadap Florence Sihombing.

Tema politik menjadi salah satu bahasan di media sosial twitter selain informasi hiburan lainnya. Kajian Clayton (2010: 3) memberikan pandangan bahwa politik menjadi satu isu populer di twitter. Isu-isu politik dapat ditemukan dalam twitter sama mudahnya dengan budaya pop seperti isu mengenai klub sepak bola dan acara televisi. Informasi politik secara mudah diperoleh dari twitter yang tidak jarang kontra dengan informasi dari media konvensional.

Gerakan sosial melalui *hashtag* telah menjadi budaya pop bagi para netizen di Indonesia, pada bulan November 2014 Presiden Joko Widodo juga mendapat kritikan dari netizen dengan *hashtag* #ShameOnYouJokowi dan #Salamgigitjari pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi, yang dipandang oleh *netizen* akan menyengsarakan rakyat.

Pemerintah RI telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur aktivitas di dunia siber, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mengenai konten yang dilarang di internet, UU ITE Pasal 27 dan 28 telah mengatur bahwa konten yang dilarang di internet adalah konten yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, yang mengakibatkan kerugian konsumen juga yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/ kelompok masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Secara garis besar, UU ITE telah cukup menjawab kebutuhan orang-orang dalam melakukan kegiatan di dunia cyber. UU ITE telah mengakomodir ketentuan material dan juga prosedural. Dengan demikian UU ITE memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitas melalui Sistem Elektronik. Bunyi pasal UU ITE pasal 27 ayat 3 adalah *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Begitu juga dengan pasal 28 ayat 2 yang berbunyi *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antargolongan (SARA).”*

Permasalahannya adalah delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE bersifat subyektif. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Di negeri ini, kritik kerap dianggap sebagai bentuk

kebencian, usaha mempertanyakan dianggap bentuk protes, dan setiap protes seringkali mendapatkan usaha pembungkaman. UU ITE berpotensi menjadi sebuah alat sensor, dan sensor selamanya hanya akan mengekalkan ketidakadilan. Berdasarkan catatan *Safenetvoice* Indonesia, dari segi historis penyusunan UU ITE, Pasal 27 UU ITE dibangun berdasarkan asas dan konstruksi yang telah berdiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada pemahaman dari KUHP, sehingga dalam UU ITE tidak perlu dijelaskan konsep atau ruang lingkup kesusilaan, perjudian, pengancaman, dan pemerasan, maupun penghinaan, dan pencemaran nama baik. (<http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/88486-ancaman-uu-ite-kebebasan-berpendapat> diakses pada 2 April 2015)

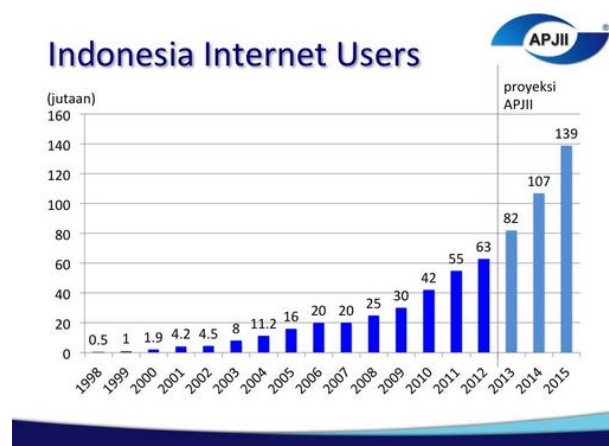
Dalam beberapa kasus, UU ITE justru mengancam kebebasan berpendapat di ruang publik Menurut Habermas dalam Nasrullah (2014:106), dalam ruang publik sebagai “*private person*” bergabung untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian publik atau kepentingan bersama. Ruang publik ini ditujukan sebagai mediasi antara masyarakat dan negara dengan memegang tanggung jawab negara pada masyarakat melalui publisitas. Tanggung jawab negara mensyaratkan bahwa informasi-informasi mengenai fungsi negara dibuat agar bisa diakses sehingga aktifitas-aktifitas negara menjadi subyek untuk dikritisi dan mendorong opini publik.

Pada tahap ini, ruang publik dirancang untuk sebuah mekanisme intitusi untuk merasionalkan dominasi politik dengan memberikan tanggung jawab negara pada warganegara. sehingga bisa dikatakan bahwa *public sphere* berarti sebuah ruang yang menjadi mediasi antara masyarakat dan negara di mana publik mengatur

danmengorganisirnya sendiri sebagai pemilik opini publik, serta harus bebas dari kontrol negara. Dari sinilah konsep yang dapat dibawa dalam kondisi dalam ruang siber di media sosial twitter di Indonesia, dengan munculnya tagar ShameOnYouSBY publik mencoba mengeluarkan opini mereka yang terorganisir dengan #ShameOnYouSBY di setiap tweet mereka.

Merujuk data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) hingga akhir 2012 menunjukkan, bahwa perkembangan internet setiap tahun semakin meningkat. Kita lihat pada tahun 2011 jumlah pengguna internet di Indonesia berkisar 55 juta orang, namun pada tahun 2013 menuju 2014 diperkirakan meningkat sekitar 82 juta hingga 107 juta pengguna internet.

Gambar 4. Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia menurut proyeksi APJII



Sumber : APJII

Jumlah ini menunjukkan perkembangan teknologi dan informasi terutama internet telah semakin akrab digunakan oleh penduduk di Indonesia. Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang dimuat dalam laman www.kominfo.go.id menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia.

Komunitas virtual menghubungkan orang-orang didalamnya untuk memiliki kepentingan bersama dalam isu-isu tertentu dan proses komunikasinya berorientasi pada topik ini. Ruang siber tidak menandai berakhirnya keberadaan ruang namun mempercepat komunikasi dan memperluas beberapa sistem sosial dalam skala global. (Christian Fuchs,2010:137)

Revolusi twitter mengklaim pengaruhnya bahwa twitter merupakan ruang publik yang baru dalam komunikasi politik yang memiliki potensi dalam pembebasan politik. Apakah twitter merupakan ruang publik bagi politik? Lindren dan Lundstrom dalam Fuchs (2013:181) mengatakan bahwa twitter dan internet mempunyai potensi kuat untuk menciptakan ruang bagi seperti apa yang disampaikan Ulrich Beck tentang terminologi subpolitik, yang mengatakan bahwa politik bukan hanya soal pemerintah, parlemen dan pemilu, namun berada dalam segala aspek bidang sosial. Konsep ruang publik sangat berhubungan erat dengan teori *public sphere* Jurgen Habermas.

Dalam ruang publik setiap orang bebas masuk dan turut berbicara tanpa ada tekanan koersif yang mengarah pada kesepakatan pragmatis. Ruang public menjadi arena untuk pengakuan kembali atas kemanusiaan seseorang, yaitu dihargai masing-masing pendapatnya. Dalam era *public sphere* di internet, khalayak media berpartisipasi dalam memberikan makna, baik menolak, mendukung, maupun

mengkritik. Terdapat proses komunikasi dialogis dan dialektika gagasan (Habermas, 1989).

Ruang publik lebih menekankan adanya ide yang terlembagakan dan mendapatkan klaim secara objektif, sehingga bisa diterima oleh publik secara luas, yang jika tidak terealisasikan, minimal ide ini melekat secara sadar di benak publik. Ruang siber memberikan dan menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk menemukan cara baru dalam berinteraksi, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial dan sebagainya (Camp dan Chien dalam Nasrulah, 2014:107). Realitas di ruang siber inilah yang menjadikan internet sebagai ruang terbuka bagi siapa saja untuk berinteraksi atau secara sekadar mengkonstruksi diri.

Habermas dalam Rycroft (2007:12) menyatakan bahwa di era masyarakat yang semakin menipis untuk bertemu secara tatap muka ini, keterlibatan entitas dalam diskusi publik lebih terwakili melalui teks atau image di internet. Sementara itu Lindgren dan Lunstrom (2011:1015) menyatakan bahwa twitter dan internet memiliki potensi yang kuat untuk menciptakan ruang seperti apa yang disampaikan Ulrich Beck tentang terminologi subpolitik, yang mengatakan bahwa politik bukan hanya soal pemerintah, parlemen dan pemilu, namun berada dalam segala aspek bidang sosial. Metode analisis wacana kritis melalui model yang dikembangkan oleh Theo van Leeuwen dapat memperdalam mengenai kajian bagaimana bagaimana gerakan sosial melalui *hashtag*#ShameOnYouSBY di media sosial twitter menghadirkan bentuk perlawanan terhadap isu politik dominan yang terjadi.

1.2 Perumusan Masalah

Munculnya gerakan sosial melalui *hashtag* #ShameOnYouSBY ini muncul sebagai akibat dari disahkannya UU Pilkada Tidak Langsung oleh DPR RI. Dalam pengertian #ShameOnYouSBY adalah tagar yang muncul di dunia maya khususnya di situs jejaring sosial Twitter pada bulan September 2014 tentang kritik masyarakat Indonesia terkait sikap *walkout* Partai Demokrat yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika rapat pembahasan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tanggal 24 September 2014.

Mereka yang berada dalam Twitter merupakan komunitas yang kreatif dan dinamis, karena itu peran hastag pun berubah menjadi dari hanya sebagai penanda topik tertentu menjadi simbol untuk menggerakkan massa. Gerakan sosial yang terhimpun dalam #ShameOnYouSBY bukan hanya salah satu bentuk ungkapan kritik masyarakat Indonesia terhadap SBY namun juga sebagai wujud ajakan untuk memikirkan bagaimana nasib bangsa di masa mendatang, dalam hal ini adalah membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD. Sekalipun yang mereka kritik merupakan Kepala Negara atau Presiden. Karena itulah perlu penelitian mengenai gerakan sosial melalui *hashtag* di media sosial twitter.

Dilihat dari fenomena diatas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: Apakah gerakan sosial #ShameOnYouSBY merupakan upaya perlawanan dari masyarakat?. Bagaimana aktor sosial Susilo Bambang Yudhoyono ditampilkan dalam teks tweet?. Bagaimana implikasi gerakan sosial melalui *hashtag* terhadap ruang publik di media sosial twitter?. Maka dari itu permasalahan yang dapat dirumuskan

adalah : Bagaimana wacana gerakan sosial melalui *hashtag*#ShameOnYouSBY di media sosial twitter menghadirkan ideologi perlawanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan wacana gerakan sosial melalui *hashtag*#ShameOnYouSBY sebagai upaya perlawanan di media sosial twitter.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya bidang kajian media baru. Manfaat teoritis dapat berupa pengembangan ide dan konsep-konsep tentang teori ruang publik di media sosial twitter, serta mengkonseptualisasikan ideologi yang dimunculkan terkait dengan persoalan perlawanan melalui gerakan sosial melalui *hashtag* khususnya #ShameOnYouSBY. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti-peneliti lain.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dalam media baru khususnya media sosial, mengingat hadirnya media sosial dapat membangun suatu gerakan sosial menjadi lebih mudah dibandingkan dengan cara-cara konvensional lainnya.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mengajak khalayak media baru untuk berpikir kritis dalam menggunakan media sosial, dan tidak menerima secara langsung isu yang

menjadi trending topik. Khalayak diharapkan memiliki kesadaran ketika terlibat dalam gerakan sosial melalui *hashtag* di twitter.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 *State of the art*

| Peneliti | Judul | Tujuan Penelitian | Metodologi | Hasil |
|--------------------------|--|---|------------------------------|--|
| Fariza Yuniar Rakhmawati | Pandangan Follower Atas Akun Twitter Anonim (Studi Etnografi Internet Pada Follower Akun Twitter @Partaisocmed | Memahami alasan <i>follower</i> melakukan <i>follow</i> , pada akun twitter @partaisocmed, serta tentang anonimitas dan tweet pada akun <i>twitter</i> @PartaiSocmed. | Etnografi Internet | Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat keragaman praktik antusiasme follower pada akun twitter anonim yang dapat diklasifikasikan menurut kategori fans, non-fans dan anti-fans. |
| Siti Khusnul Khotimah | Berdemokrasi Di Ruang Publik :Langsung,Umum ,Bebas Dan Tanpa Rahasia Dalam Media Sosial Twitter @Triomacan2000 | Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti akun @triomacan2000 yang dalam setiap kicauannya selalu memberikan isu-isu mutakhir di bidang politik dan pemerintahan yang korup. | Analisis Wacana | Hasilnya adalah bahwa ruang publik media sosial seperti halnya akun twitter @triomacan2000 merupakan arena demokrasi di mana pertukaran makna terjadi melalui penolakan, dukungan dan kritikan antar individu yang terlibat dan seringkali individu satu menekan individu lainnya. Dengan demikian perspektif habermas mengenai ' <i>public sphere</i> ' tanpa ' <i>coercive power</i> ' masih utopia. |
| Mayasari | Tweet Farhat Abbas Dalam Akun | Mendeskripsikan strategi wacana yang digunakan | Analisis Wacana Kritis Model | Hasil dari penelitian ini <i>Tweet</i> Farhat Abbas mengandung |

| | | | | |
|--|---|--|------------------|--|
| | Twitter Pribadi Farhat Abbas: Analisis Wacana | dalam tweet Farhat Abbas dalam akun pribadinya, dan mendeskripsikan proses sosial yang terkandung di dalamnya. | theo Van Leeuwen | strategi representasi wacana yang menggunakan piranti-piranti wacana tertentu, yakni: inklusi, gaya bahasa, presuposisi, dan modalitas, dan secara sosial, Farhat memanfaatkan prinsip psikologis, yakni: prinsip chaos, prinsip leverage, prinsip wave, dan prinsip butterfly effect. |
|--|---|--|------------------|--|

1.5.2 Paradigma Penelitian

Menurut Guba dalam Norman K Denzin (2009:124) mendefinisikan paradigma yaitu sebagai serangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan. Paradigma mewakili pandangan dunia yang menentukan, bagi pemakainnya, sifat “ dunia , “ tempat individu di dalamnya, dan rentang hubungannya yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian – bagiannya. Seperti pendapat Kuhn (1970) dalam Crook (2005: 207) menjelaskan paradigma sebagai serangkaian keyakinan-keyakinan, prosedur dan praktik kerja yang menginformasikan pandangan dunia yang dominan dan membentuk ilmu pengetahuan modern.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Paradigma kritis tidak sekedar menggambarkan mekanisme tersembunyi yang menjelaskan realitas yang diamati, tetapi juga mengkritik kondisi dan menyiratkan perubahan (Gunter, 2000:7). Tujuan utama penelitian ini yaitu mengungkapkan, menjelaskan dan memahami struktur kekuasaan dan hubungannya dalam masyarakat.

Media, termasuk fenomena yang terjadi di media siber, diidentifikasi sebagai sumber yang memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol sosial yang dikendalikan elite sosial, budaya dan politik. Artinya melalui media adalah nilai-nilai tertentu, keyakinan, dan pendapat disebarluaskan. Lewat media pula kelas sosial tertentu mempertahankan posisi mereka dalam masyarakat. Pandangan kritis melihat bahwa realitas sosial memiliki beberapa lapisan dan setiap lapisan ini ada struktur atau mekanisme tertentu yang harus terus menerus diamati (Nasrulah, 2014:164-165). Gerakan sosial melalui *hashtag#ShameOnYouSBY* di twitter ini merupakan upaya untuk mengkritik kondisi yang terjadi dan menyiratkan rencana perubahan. Dalam pandangan kritis tidak hanya menggambarkan konstruksi dari teks di media, melainkan sampai pada membongkar di balik teks, nilai-nilai apa yang akan dicapai oleh pembuat teks dan ideologi apa yang disebarluaskan.

Terdapat beberapa karakteristik utama dalam seluruh filsafat pengetahuan paradigma kritis yang bisa dilihat secara jelas. Berikut pemaparan mengenai kepercayaan dasar dari paradigma kritis dari Guba dan Lincoln dalam Denzin dan Lincoln (2009: 136).

1.5.2.1 Aspek Ontologi:

Realisme Historis. Sebuah realitas dianggap bisa dipahami pernah suatu berciri lentur, namun dari waktu ke waktu dibentuk oleh serangkaian faktor sosial, politik, budaya dan ekonomi, etnik gender, yang kemudian mengkristal (membatu) kedalam serangkaian struktur yang saat ini (secara tidak tepat) dipandang sebagai “nyata”, yakni alamiah dan abadi. Demi tujuan-tujuan praktis, struktur tersebut adalah “nyata”, yakni sebuah realitas maya dan historis.

1.5.2.2 Aspek Epistemologi:

Transaksional dan Subjektivitas. Peneliti dan objek yang diteliti terhubung secara interaktif, dengan nilai-nilai peneliti (dan nilai “orang-orang lain” yang terposisikan) mempengaruhi penelitian secara tak terhindarkan. Oleh karenanya, temuan-temuan penelitian diperantarai oleh nilai. Perhatikan bahwa sikap ini secara efektif menentang perbedaan tradisional antara ontologi dengan epistemologi, sesuatu yang dapat diketahui ternyata terjalin secara erat dengan interaksi antara seorang peneliti tertentu dengan obyek atau kelompok tertentu. Garis putus-putus yang memisahkan baris ontologis dengan epistemologis.

1.5.2.3 Aspek Metodologi:

Dialogis dan Dialektis. Sifat transaksional peneliti membutuhkan dialog antara peneliti dan subjek-subjek penelitian, dialog tersebut haruslah berciri dialektis agar dapat mengubah ketidaktahuan dan kesalahpahaman (yakni, menerima struktur-struktur yang diperantai secara historis yang tak dapat diubah) menjadi kesadaran yang lebih mendalam/matang (yang menyadari bagaimana struktur-struktur dapat diubah dan memahami tindakan apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan) atau seperti ungkapan Giroux dalam Norman K Denzin (2009:136), “Sebagai intelektual transformatif,. Untuk menyingkap dan menggali bentuk-bentuk pengetahuan historis dan terkungkung yang mengacu pada pengalaman akan penderitaan, konflik, dan perjuangan kolektif, untuk mengaitkan gagasan tentang pemahaman historis dengan elemen-elemen kritik dan harapan”. Para peneliti transformasional menampilkan “Kepemimpinan transformasional” (Burns, dalam Norman K Denzin,2009:136).

1.5.3 Teori Ruang Publik

Secara historis ruang publik muncul pertama kali pada abad ke-17 di Eropa di mana kemunculannya bersamaan dengan berkembangnya kapitalisme. Pada era proto kapitalisme mulai muncul kelas baru dalam masyarakat, yaitu kelas borjuis. Mulanya mereka hanya melakukan usaha perdagangan biasa lalu lambat laun mereka memulai mode produksi kapitalis. Dengan latar ini, ruang publik yang muncul pada era tersebut merupakan ruang publik borjuis, yaitu ruang publik yang ditempati oleh kelas komersial atau pedagang dan profesional. Distingsi antara publik dan privat merupakan konstruksi yang melandasi munculnya ruang publik. Kepublikan direpresentasikan oleh negara yang mengatur masyarakat sedangkan keprivatan direpresentasikan oleh masyarakat sipil yang otonom. Ruang publik borjuis muncul ketika masyarakat sipil (kaum borjuis) mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara, yang dirumuskan berupa pertanyaan tentang sudahkah negara melayani kepentingan publik. Ruang publik borjuis dengan demikian merupakan ruang dari orang-orang privat yang berkumpul bersama sebagai publik. Negara diajak berdebat tentang isu-isu yang pada dasarnya bersifat privat namun memiliki relevansi publik, seperti isu pertukaran komoditas dan kerja sosial (Habermas, 1989: 27).

Dalam hubungannya dengan negara, ruang publik berperan sebagai intermediari antara negara dan kaum borjuis. Melalui artikulasi opini yang dicuatkan di dalam ruang publik semacam itu, tersimpan misi agar negara lebih responsif kepada ekspresi kebutuhan dan kepentingan kaum borjuis dalam opini publik (Habermas, 1989: 14-26). Pada mulanya, opini yang disuarakan dalam ruang publik

berperan sebagai pengecek legitim tidaknya kekuasaan yang digunakan oleh pemerintah yang nonrepresentatif dan tertutup melalui pengujian apakah kepentingan umum dari masyarakat telah diupayakan perwujudannya oleh pihak penguasa. Kemudian lambat laun ruang publik mendapatkan signifikansi yang menjulang ketika dirinya menjadi basis dari kebijakan publik itu sendiri, yaitu bahwa kebijakan publik harus berjangkar kepada kehendak rasional yang muncul dan bersirkulasi dalam debat-debat rasional di ruang publik (Thomassen, 2010: 36).

1.5.3.1 Ideal Normatif yang Inheren Dalam Konsep Ruang Publik

Dalam *Structural Transformation*, Habermas (1989) menerapkan metode kritik imanen. Ini adalah metode yang biasa dipakai para pendahulunya, yaitu generasi pertama Teori Kritis seperti Horkheimer dan Adorno. Kritik imanen merupakan cara mengkritik suatu objek, dalam hal ini ruang publik, dengan berdasarkan kepada istilah dan idealitas konsep serta nilai dari objek itu sendiri dan bukannya menggunakan nilai atau standar yang ekstern atau transenden dari objek tersebut, dengan tujuan untuk menggiring dimensi-dimensi kekurangan atau kesalahan objek tersebut kepada cahaya kebenaran atau idealitas. Para pemikir Teori Kritis mengatakan bahwa metode ini diperoleh dari Hegel dan Marx (Finlayson, 2005: 9).

Lebih persisnya, Habermas mengatakan tiga ideal normatif yang inheren dalam konsep ruang publik (Habermas, 1989: 36-37). *Pertama*, ruang publik merupakan sejenis pergaulan sosial yang sama sekali tidak mengasumsikan kesamaan status antar orang karena konsep status dalam ruang publik sendiri dipandang tidak memiliki signifikansi apa pun. Dalam hal ini preferensi akan kedudukan diganti oleh nilai kebijaksanaan yang setara dengan nilai persamaan setiap orang. Dalam ruang

publik hal yang menduduki tempat yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain bukanlah status, pangkat, harta, atau keturunan, melainkan argumen yang lebih baik. *Kedua*, meskipun setiap orang memiliki kepentingan berbeda-beda yang mungkin saja dipengaruhi oleh perbedaan status, kepentingan sendiri juga dipandang tidak memiliki signifikansi. Apa yang menyatukan orang-orang yang bertemu di ruang publik adalah kesamaan akan penggunaan rasio yang berkarakter “tanpa kepentingan” (*“disinterested” interest of reason*). Artinya, justifikasi terhadap argumen yang muncul dalam ruang publik haruslah berlandas kepada kepentingan umum dan bukannya kepentingan partikular. *Ketiga*, ruang publik pada prinsipnya bersifat inklusif. Inklusivitas ini tercermin dari formalitas keras dari syarat untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik, yaitu setiap anggota umat manusia yang dapat menggunakan rasionalitasnya (Thomassen, 2010: 41).

1.5.3.2 Pluralitas Ruang Publik

Sementara itu dalam *“Between Facts and Norms”*, Habermas (1996) memberikan pengakuannya akan pluralitas ruang publik. Ini adalah pengakuan yang muncul dari refleksi atas kondisi empiris masyarakat modern kontemporer yang semakin kompleks dan plural. Setiap komunitas dan kelompok dapat membentuk ruang publiknya sendiri. Secara konseptual, ruang publik dipahami sebagai jaringan yang kompleks dan terdiferensiasi namun yang mengkonstitusi dirinya sebagai “teks tunggal” dengan tujuan untuk mengamankan kapasitas individu-individu dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan atau legitimitas atas kemasukakalan dan keadilan Publik pandangan yang mereka utarakan (Johnson, 2006: 87-88). Secara definitif, Habermas mengatakan apa yang dimaksudkannya dengan ruang publik:

The public sphere cannot be conceived as an institution and certainly not as an organization...The public sphere can best be described as a network for communicating, information and points of view...the streams of communication are, in the process, filtered and synthesized in such a way that they coalesce into bundles of topically specified public opinions (Habermas, 1996:360).

Untuk memahami ruang publik dengan lebih jernih, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian Habermas tentang politik itu sendiri. Habermas membedakan antara dua jenis politik, yaitu politik informal dan politik formal. Bagi Habermas, politik informal merupakan jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan sudut pandang (Habermas, 1996: 360). Di dalamnya, berlangsung diskursus yang bersifat spontan dan bebas. Melalui diskursus tersebut individu membentuk identitas mereka secara deliberatif dan terutama melancarkan opini tentang isu-isu publik. Sebagaimana telah disebutkan, politik informal ini tidak terinstitusionalisasikan dan tidak didesain untuk mengambil keputusan, melainkan mengambil peranan sebagai pelaku diskursus dan komunikasi yang disebut proses pembentukan opini individual dan kehendak (*individual opinion-and will-formation formation*).

Tempat di mana politik informal ini dijalankan disebut dengan ruang publik. Karena strukturnya yang tidak terorganisasi, politik informal ini lebih rentan terhadap efek represif dan eksklusif dari distribusi kekuasaan yang tak merata, kekerasan struktural, dan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis daripada politik formal. Akan tetapi, di sisi lain politik informal juga mempunyai kelebihan yaitu menjadi medium dari komunikasi tak terbatas (*unrestricted communication*). Di dalamnya, masalah-masalah baru dapat dirasakan dengan lebih sensitif, diskursus dapat dibawakan secara lebih luas dan ekspresif, identitas kolektif dan artikulasi kebutuhan dapat disuarakan tanpa mengalami tekanan yang besar sebagaimana dalam politik formal (Habermas, 1996: 307-308).

1.5.3.3 Partisipasi dalam Ruang Publik

Sebagai suplemen atas politik informal adalah politik formal. Politik formal merupakan arena institusional dari komunikasi dan diskursus yang didesain secara spesifik untuk mengambil keputusan. Institusi politik formal contohnya berupa parlemen, kabinet, dan partai politik. Perlu dicatat di sini bahwa politik formal tidak identik dengan negara sebab konsep negara selain terdiri dari politik formal sebagaimana yang telah disebutkan juga terdiri atas elemen eksekutif, yudikatif, dan birokrasi. Sistem politik berfungsi secara ideal manakala politik formal menyerap secara lancar masukan dari politik informal. Hubungan antara keduanya dijamin, misalnya, melalui hak partai politik (representasi politik formal) untuk “berkolaborasi” di dalam pembentukan kehendak politik masyarakat, sebagaimana hak (aktif maupun pasif) warganegara untuk memilih dan hak-hak partisipatoris lainnya (Habermas, 1996: 368).

Habermas (1996: 357) mengatakan bahwa deskripsi isu dalam arena pinggiran, yakni ruang publik informal, dapat mempengaruhi agenda dari pusat pembuatan keputusan dalam kasus di mana “persepsi atas masalah dan situasi masalah berada pada perubahan konfliktual”. Artinya publik yang tidak bersetuju dapat menjalarkan resonansi efektif terhadap pusat pembuatan keputusan dan akan, dalam beberapa kondisi, mampu untuk menginisiasi model penyelesaian masalah yang dapat melintasi dan melampaui model pembuatan keputusan yang rutin dan terbirokratisasikan (Johnson, 2006: 91).

Ruang publik yang mengacu kepada pemikiran Habermas diharapkan merupakan ruang dimana perdebatan kritis tentang kepentingan publik yang terkait

dengan hubungan Negara dengan masyarakatnya terjadi. Perdebatan itu dimungkinkan apabila kekuasaan di dalam ruang tersebut terdistribusi dengan merata anggota-anggotanya sehingga memungkinkan emansipasi dalam masyarakat. Emansipatori sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk membebaskan diri dari segala dominasi yang dialaminya, sehingga kemampuan untuk seseorang mampu mengemukakan eksistensi diri atau pemikirannya. Proses emansipatori terjadi ketika akses publik terhadap komunikasi terbuka dan mereka dapat terlibat sebagai subjek dalam proses komunikasi yang terkait dengan kepentingannya sehingga membebaskannya dari kesadaran palsu (*false consciousness*)(Maryani, 2007:53).

Tanpa ruang publik maka kepentingan solidaritas sosial (masyarakat) tidak akan dapat terungkap dan buntulah komunikasi antara masyarakat dan birokrasi karena lokus ruang publik inilah yang menjadi ruang publik politik bagi masyarakat sebagai warga negara dengan birokrasi (negara) yang bertanggung jawab atas warganya, konsep ruang itu sendiri bukanlah metafora akan tetapi sebuah ruang sosial yang terbentuk lewat komunikasi (Hardiman, 2004).

Dalam tulisannya “The Structural Transformation of the Public Sphere” (1962), Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai sebuah komunitas virtual atau imajiner yang tidak selalu ada di setiap ruang. Dalam bentuk yang ideal, ruang publik adalah ruang yang terdiri dari orang swasta berkumpul bersama sebagai publik dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat dengan negara. Melalui tindakan penyusunan dan dialog, ruang publik menghasilkan pendapat dan sikap yang berfungsi untuk menegaskan atau membentuk tantangan.

1.5.3.4 Demokrasi dalam Ruang Publik Virtual

Dalam keadaan masyarakat bertemu dan berdebat akan sesuatu secara kritis, maka akan terbentuk apa yang disebut dengan masyarakat madani. Secara sederhana, masyarakat madani bisa dipahami sebagai masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai tanpa paksaan.

Media massa mempunyai peranan yang sangat vital dalam ruang publik. Dalam model demokrasi deliberatif, fungsi media massa adalah menyalurkan aliran komunikasi publik (Habermas, 1996: 307). Pada saat itu Habermas mengembangkan teori media sebagai ruang publik dalam media surat kabar, majalah, radio dan televisi. Namun saat ini konsep tersebut juga dibawa dalam media baru. Habermas. Jika dalam media massa konvensional ruang publik tidak sepenuhnya bisa digunakan oleh khalayak, karena terdapatnya peran *gatekeeper* dalam media yang menyaring atau mengatur informasi. Namun dalam media baru khususnya media sosial twitter semua orang dapat masuk dan terlibat dalam diskusi tanpa adanya pengaruh dari *gatekeeper*.

Pada perkembangan selanjutnya ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik, seperti lapangan, warung kopi dan salon, tetapi juga ruang di mana proses komunikasi bisa berlangsung, seperti media massa pada saat itu dan media baru (internet) di era saat ini. Dalam ber aspirasi, masyarakat masih terbatas dan belum memiliki kebebasan mutlak, karena terbentur dengan ideologi, kepemilikan, dan kepentingan media. Ini menjadi pertanda bahwa media massa belum sepenuhnya menjadi ruang publik yang hakiki bagi masyarakat.

Harapan terhadap media dalam membangun ruang publik telah sering diungkapkan dalam hubungannya dengan media baru. Dhalgren (2005) (dalam McQuail, 2011: 200) menyebutkan cara yang berbeda di mana internet dapat membantu beberapa hal seperti: meningkatkan hubungan langsung antara pemerintah dan warga negara; memberikan panggung dan saluran untuk aktivis dan pengacara; menyelenggarakan forum sipil untuk debat dan diskusi; dan juga menambah lebih banyak cabang jurnalisme yang beragam. Sementara itu terdapat beberapa cara untuk membedakan model ruang publik. Dalam hal ini Liu (2007:37-38) membuat perbandingan 3 model ruang publik berdasarkan jenis ruang interaksi yang digunakan.

Tabel 1.1 Perbandingan 3 Model Ruang Publik Liu

| Kategori Pembeda | Ruang Publik Kedai Kopi | Ruang Publik Media Massa | Ruang Publik Internet |
|--------------------------|--------------------------------|---|---|
| Partisipasi | | | |
| Partisipan | Borjuis Terdidik | Tokoh Masyarakat, dibatasi status sosial, ekonomi dan politik | Pengguna internet, dibatasi pengetahuan Teknologi Informasi |
| Keterbukaan Akses | Sedang | Rendah | Tinggi |
| Model Komunikasi | Tatap Muka | Seolah-olah termediasi | Termediasi |
| Cakupan | Kecil | Besar | besar |
| Informasi | | | |
| Jumlah & Keragaman | Sedikit | Melimpah | Maksimum |
| Jenis Opini | Plural | seragam | Plural |
| Filter | Tidak ada penyaringan opini | Redaktur/Pengelola memfilter opini dan informasi | Tak ada penyaring opini, tetapi ada pengelola yang bisa mengeliminasi informasi |
| Kebebasan Memilih Sajian | Pasif | Pasif | Aktif |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | Informasi | | | |
| | Pengarsipan | Tidak ada | Ada tetapi tidak mudah ditelusuri | Ada dan mudah ditelusuri |
| | Interaktivitas | Tinggi | Rendah | Tinggi |
| | Anonimitas | Tidak mungkin | Tidak mungkin | Mungkin |
| | Potensi Diskusi | Tinggi | Rendah | Tinggi |
| | Batasan Geografis | Tinggi | sedang | Rendah |

Sumber: Liu (2007:37-38)

Partisipasi warga dapat disebut sebagai Jurnalisme warga atau citizen journalism dimana mereka dapat memanfaatkan media-media yang ada baik media arus utama (mainstream) ataupun media sosial. Dalam media arus utama seperti media cetak melalui surat pembaca atau komentar melalui SMS, media televisi melalui program “*Trending Topic*” yang interaktif dan memberi komentar melalui twitter di televisi pada program televisi tertentu. Media radio juga sering memberikan ruang melalui wawancara ke masyarakat langsung sebagai reporter untuk informasi-informasi tertentu seperti info lalu lintas. Media online juga sering memberikan ruang melalui kolom komentar untuk kritik dan saran. Sedangkan media sosial dapat langsung mempublikasikan informasi melalui blog (wordpress, blogspot), mikroblog (twitter), media sosial blog (kompasiana, ohmy news, now public), situs pertemanan (facebook, friendster), situs foto share (flickr, twitpic), situs video share (Youtube).

Kekuatan media sosial sebagai kekuatan penyeimbang dominasi media mainstream cukup banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Media sosial Facebook dan didukung perubahan teknologi yang terus diperbaharui telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi alat yang efektif dalam advokasi dan komunikasi emergensi (Pillay, van Niekerk & Maharaj, 2010). Peranan media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*

dalam membentuk lanskap politik global dan nasional sangat kuat, seperti dalam pemilihan umum di Iran tahun 2009, dan yang paling populer adalah keruntuhan beberapa rezim pemerintahan di Afrika Utara dan Timur Tengah di tahun 2011 dan 2012 (Niekerk, & Maharaj, 2013:1162).

Oleh karena itu, bentuk partisipasi aktif warga berkomunikasi di dalam media konvensional dan media-media sosial merupakan bentuk jurnalisme warga. Partisipasi aktif dari masyarakat ini berperan dalam pembangunan ruang publik yang juga dapat diartikan sebagai peranan masyarakat membangun masyarakat madani (civil society) dalam konteks warga dalam pembangunan demokrasi. Partisipasi masyarakat di ruang publik sebagai suatu ruang komunikasi para warga negara untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan tersebut disebut juga “ruang publik politis”.

Rakyat tidak sekedar menjadi mayoritas yang diam, tapi mampu mengartikulasikan ide dan gagasan-gagasannya sebagai warga negara (citizen). Media sosial berperan penting dalam mentransformasi apatisisme politik menuju warganegara aktif melalui proses deliberatif. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan internet telah memicu munculnya ruang publik baru bagi kelompok-kelompok yang selama ini menggugat kemapanan rejim Soeharto. Internet setidaknya menawarkan ruang alternatif untuk membebaskan diri dari intervensi dan sensor ketat negara.

Dalam hal ini, Twitter dan Facebook sebagai media sosial paling populer menjadi tantangan bagi siapa saja yang selama ini memonopoli informasi. Bahkan Twitter juga sering menjadi sarana bagi pengguna untuk menantang keadaan sosial yang tidak beres, yang harus menjadi perhatian pemerintah. Di Indonesia, penggunaan media baru untuk gerakan sosial semakin banyak, karena media baru dianggap bisa

menjadi sebuah alat untuk melakukan perubahan dan demokrasi. Saat ini gerakan sosial tidak selalu dilakukan secara fisik, melainkan juga melalui non-fisik. Dengan kata lain menggunakan media baru khususnya media sosial. Seperti halnya dalam gerakan sosial melalui *hashtag* #ShameOnYouSBY di media sosial Twitter yang menentang keputusan pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Pilkada Tak Langsung.

1.5.4 Ideologi Perlawanan

Kajian mengenai ideologi lahir pada abad 19 yang disebut abad ideologi. Marx (1932) berpendapat dalam bukunya yang berjudul *German Ideology* bahwa:

The Ideas of the ruling class are, in every age, the ruling ideas: i.e. the class, which is the dominant material force in society, is the same time the dominant intellectual force.

Marx memandang dalam ideologi sangat erat dengan kekuasaan yang terpusat pada negara atau masyarakat politik berhadapan-hadapan dengan masyarakat sipil. Pandangan Marx (1932) mengenai hubungan antara kekuasaan dan ideologi yang berpusat pada negara tersebut ditentang oleh Antonio Gramsci (1971). Menurut Gramsci, ideologi yang dominan tidak hanya dapat dimenangkan melalui jalan revolusi atau kekerasan oleh institusi-institusi negara tapi juga dapat melalui jalan hegemoni melalui institusi-institusi lain, seperti institusi agama, pendidikan, media massa, dan keluarga. (Donny Gahral Adian, 2001:121-127) Maka dalam hal ini bisa dilakukan melalui media sosial twitter.

Merujuk pada pemikiran Gramsci maupun Habermas maka untuk melakukan perubahan dalam masyarakat kapitalis tampaknya kedua pemikir itu menganggap bahwa perubahan sosial akan sulit terjadi apabila hanya mengandalkan kelas buruh

atau kaum proletar. Akan tetapi diperlukan individu-individu yang memiliki kemampuan dan kesadaran kritis yang kemudian mampu mengembangkan kesadaran kritis tersebut dalam kelompok masyarakat tertindas. Individu-individu itulah yang diistilahkan Gramsci dengan intelektual organik, yaitu individu yang memiliki kesadaran akan kelompoknya termasuk kesadaran kritis bila kelompoknya terdominasi (Maryani,2007:65). Sementara untuk memunculkan kesadaran kritis tersebut diperlukan pula suatu ruang atau saluran dimana ideologi disebarluaskan. Seperti pada pandangan Marx bahwa media adalah salah satu lahan di mana ideologi dominan disebarluaskan, maka dari itu counter hegemony sebagai sebuah resistensi mengambil salah satu bentuknya dalam media sosial twitter sebagai perlawanan terhadap dominasi kekuasaan oleh pemerintah.

Kekuasaan dapat bersifat *coercive* yang melibatkan kekuatan fisik secara langsung untuk menekan dan memelihara dominasi atau dapat juga merupakan hasil dari adanya perbedaan akses dan distribusi dari sumber-sumber yang fundamental dalam masyarakat. Resources sendiri dapat berupa *the material sense of property* atau *raw material* maupun bentuk-bentuk simbolik seperti pengetahuan, melek huruf, ilmu pengetahuan dan tipe-tipe kapital lainnya.

Namun pemikiran tentang kekuasaan tidak semata-mata hanya melihat sebagai suatu modal atau resources yang dimiliki, sebagaimana lazim dalam pemikiran Marxian dan neo-Marxian. Kaum Marxian, menurut Foucault, lebih cenderung memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang setimbang dengan komoditas sehingga bisa dialih-hakkan (diberikan, diambil, dirampas). Pemahaman seperti itu disebut Foucault dengan “ekonomisme” dalam teori kekuasaan (Foucault, 1997:13).

Karena kekuasaan adalah sebuah tindakan strategis maka sangat bisa dipahami kalau ia selalu hadir dalam setiap hubungan, terutama yang dicirikan oleh ketidakseimbangan. Namun hubungan yang tidak seimbang itu sekaligus juga merupakan produk dari kekuasaan. Karena pada dasarnya, menurut Foucault, penggunaan “teknologi politis” kekuasaan itulah yang menciptakan, di dalam setiap hubungan dipastikan ada kuasa yang kemudian selalu punya potensi untuk melakukan resistensi. Bahkan lebih dari itu, resistensi bukan hanya sesuatu yang potensial dalam kekuasaan, tapi resistensi bahkan sesuatu yang niscaya dalam kekuasaan. Bagi Foucault, resistensi dari perlawanan adalah sesuatu yang inheren dan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan itu sendiri. Di mana ada penggunaan kekuasaan pasti ada resistensi (Foucault, 2002: 177-179).

Di dalam sistem dominasi kuasa terkonsolidasikan sehingga menghasilkan relasi asimetris dan di dalamnya terdapat individu-individu yang ter subordinatkan. Relasi kuasa yang dominan hanya akan memberi sedikit ruang terjadinya resistensi karena ruang kebebasan individu untuk bertindak sangat terbatas. Tipe relasi yang lain adalah relasi kuasa sebagai permainan strategis antara pihak-pihak yang memilih kebebasan memilih. Tipe ketiga adalah relasi kuasa yang dijalankan pemerintah dan tergantung pada gaya kepemimpinannya. Melalui gaya atau sistem kepemimpinannya relasi kuasa pemerintah dapat mengarah kepada relasi kuasa yang bersifat dominan maupun relasi kuasa dimana pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan memilih (Foucault, 2002:166-180).

Walaupun pemikiran Foucault (2002) melukiskan gambaran yang suram tentang relasi kuasa di dalam masyarakat akan tetapi sisi positifnya Foucault yakin

bahwa pengetahuan dan kekuasaan bersaing dan di antara keduanya selalu terjadi resistensi. Oleh karena itu resistensi sendiri tidak saja berlawanan dengan kekuasaan tetapi juga sumber kekuasaan di dalam diri mereka sendiri. *“they are social points at which the powers of the sub ordinate are most clearly expressed”* (Baker, 2000:243).

Sementara itu konsepsi tentang resistensi sendiri seperti dikemukakan oleh Stuart Hall adalah ‘as challenges to and negotiations of the dominant order which could not be assimilated to the traditional categories of revolutionary class struggle’ (Baker, 2000:341). Selain pengertian di atas untuk memahami resistensi menurut Fiske akan lebih mudah dengan memahaminya dalam dua tipe yang berkaitan dengan dua bentuk kekuasaan sosial. Pertama, *semiotic power* yaitu kekuatan untuk mengkonstruksikan makna, kesenangan, dan identitas sosial. Kedua, kekuasaan sosial yaitu kekuasaan untuk mengkonstruksikan sistem sosial ekonomi.

Hall juga menegaskan bahwa resistensi bukan suatu kualitas tindakan yang tetap melainkan sebagai sesuatu yang rasional dan konjungtural. Artinya, resistensi tidak dipahami sebagai sesuatu yang tunggal dan universal. Resistensi adalah sesuatu yang terbentuk oleh berbagai repertoar yang maknanya bersifat khas untuk waktu, tempat dan hubungan sosial tertentu (Baker,2000:455). Seperti apa yang disampaikan Hall maka pengertian resistensi seharusnya didasarkan pada pemahaman tentang konteks dan historis masyarakatnya. Terutama ketika berusaha memahami resistensi melalui media sosial twitter, seperti gerakan perlawanan atau resistensi menggunakan *hastag#ShameOnYouSBY*.

Sementara itu, Scott (2000) meninjau pengertian resistensi secara umum yang menafikan situasi yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Seringkali pengertian

resistensi yang digunakan justru ada dalam kerangka kelompok dominan sehingga tidak mampu menangkap fenomena resistensi yang sebenarnya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertindas atau termarginalkan. Mengawali upaya untuk memahami pengertian resistensi yang mampu menangkap gejala resistensi yang dilakukan oleh kelompok tertindas atau termajinalkan Scott menyimpulkan berbagai pandangan tentang resistensi. Berdasarkan berbagai pengertian dan konsep yang ada Scott menyimpulkan bahwa ada dikotomi antara pengertian tentang aksi atau tindakan yang dimaknai sebagai perlawanan yang real dengan aksi kecil-kecilan, insidental bahkan dianggap sebagai gejala sekunder suatu kejahatan (Maryani, 2007:69-70).

Perlawanan diartikan sebagai sesuatu yang bersifat, (a) organik, sistematis, kooperatif, (b) berprinsip tidak mementingkan diri sendiri, (c) berkonsekuensi revolusioner dan atau (d) mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis dominasi itu sendiri. Berlawanan dengan kegiatan kecil-kecilan, insidental atau yang bersifat gejala kejahatan adalah (a) tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, (b) bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, (c) tidak berkonsekuensi revolusioner dan atau, (d) menyiratkan dalam maksud dan arti mereka, akomodasi terhadap sistem dominasi (Scott, 2000:385-386).

Sebagian besar perlawanan dilakukan bukanlah untuk menjatuhkan atau mengubah sistem dominasi melainkan untuk bertahan hidup (Scott, 2000:396). Berdasarkan pengertian resistensi yang ada dan realitas resistensi yang kompleks tampaknya resistensi tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan dan upaya dominasi yang dilakukan oleh kelompok atau kebudayaan dominan tertentu pada kelompok atau kebudayaan lainnya yang subordinat. Akan tetapi dalam kenyataannya resistensi juga

tidak selalu dilakukan dalam bentuk perlawanan terbuka. Resistensi juga memiliki beragam bentuk baik secara kelompok maupun individu (Maryani, 2007:71). Secara kelompok resistensi dalam suatu masyarakat dapat terwujud secara setruktural dimana budaya masyarakat tertentu memiliki kekuatan untuk mempertahankan eksistensinya ketika mereka merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang mendominasi. Melalui gerakan sosial dengan *hashtag* di media sosial twitter, individu dapat terlibat dalam gerakan perlawanan yang disatukan dalam *hashtag* tertentu.

1.5.5 Gerakan Sosial

Jurgen Habermas, sebagaimana dikutip oleh Pasuk Phongpaichit (2004) menyatakan bahwa *Gerakan Sosial adalah Defensive relations to defend the publik and private sphere of individuals againts the inroad of the state system and market economy.* (Gerakan Sosial adalah hubungan defensive individu-individu untuk melindungi ruang publik dan private mereka dengan melawan serbuan dari sistem negara dan pasar).

Anthony Giddens (dalam Fadhillah Putra,2006:1) menyatakan Gerakan Sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (action collective) diluar ruang lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Sedangkan Mansoer Fakhri (2002:XXvii) menyatakan bahwa Gerakan Sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai sosial.

Sejalan dengan pengertian Gerakan Sosial di atas, Herbert Blumer merumuskan Gerakan Sosial sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan. Robert Mises (2004:6-7) dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan Sosial mendefinisikan Gerakan Sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat.

Tetapi, David Meyer dan Sidney Tarrow, dalam karya mereka *Social Movement Society (1998)*. Memasukkan semua ciri yang sudah disebutkan di atas dan mengajukan sebuah definisi yang lebih inklusif tentang Gerakan Sosial, yakni : Tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas.

Tarrow (1998) menempatkan gerakan sosial di dalam kategori yang lebih umum tentang politik perlawanan (*contentious politics*). Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus penentangan (*cyclus of contention*) dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa, sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh, menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawannya. Perlawanan seperti ini biasanya muncul ketika kesempatan dan hambatan politik tengah berubah dan menciptakan dorongan bagi aktor-aktor sosial yang kurang memiliki sumberdaya pada dirinya sendiri. Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digunakan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial.

Menurut Tarrow, tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan (*contentious collective action*). Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk - singkat dan berkelanjutan, terlembagakan atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Kebanyakan tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang-orang yang bergabung didalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa pertentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu seringkali merupakan satu-satunya sumberdaya yang dimiliki oleh orang-orang awam dalam menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat, seperti negara.

Bagi Tarrow (1998: 4-7) konsep gerakan sosial harus memiliki empat hal yang mendasar. Diantaranya adalah:

a. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Yang membedakan gerakan sosial dari tindakan-tindakan kolektif lain, seperti memberikan suara (*voting*), permainan sepakbola dan lain-lain adalah bahwa gerakan sosial selalu ditandai oleh tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang mengganggu terhadap elit, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain atau aturan-aturan kultural tertentu.

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (*dana, organisasi, akses terhadap negara*). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, pertentangan (*contention*) mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi *focus point* (titik fokus) bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

b. Tujuan Bersama (*common purpose*)

Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh

otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dan kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

c. Solidaritas dan Identitas Kolektif

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (common denominator) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian menandai perubahan dari sekadar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsensus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsensus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas atau keyakinan agama.

d. Memelihara Politik Perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individual atau

berubah menjadi sekte religius atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran di mana suatu pertentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

1.5.6 Media Baru

Munculnya media baru dalam perkembangan teknologi komunikasi membawa dampak dalam komunikasi massa. Internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga dapat disetarakan dengan pengolahan, pertukaran dan penyimpanan. Media baru merupakan lembaga komunikasi publik juga privat dan diatur (atau tidak) dengan layak. Kinerja mereka tidak seteratur sebagaimana media massa yang professional dan birokratis, setidaknya dalam media baru ini bebas dari control. Dalam hal ini McQuail (2011:153) merumuskan perubahan utama yang berkaitan dengan munculnya media baru:

1. Digitalisasi dan konvergensi atas segala aspek media
2. Interaktivitas dan konektivitas jaringan yang semakin meningkat.
3. Mobilitas dan delokasi yang mengirim dan menerima.
4. Adaptasi terhadap peranan publikasi dan khalayak
5. Munculnya beragam bentuk baru 'pintu' (*gateway*) media.
6. Pemisahan dan pengaburan dari lembaga media.

Jika dikaitkan dalam tema-tema dalam teori media (lama) seperti *kekuasaan dan ketidaksetaraan*, kita lebih sulit untuk menghubungkan media baru dengan kepemilikan dan praktik kekuasaan. Terdapat alasan untuk menganggap media baru berkontribusi mengontrol kekuatan dari penguasa pusat, terutama

melalui pengawasan pengguna. *Kedua, integrasi sosial dan identitas*, media baru dapat memainkan peranan langsung dalam proyek kehidupan individual (bersifat individual), juga menawarkan keberagaman pengguna dan partisipasi yang lebih besar. *Ketiga, perubahan sosial dan perkembangan*, media baru muncul sebagai agen baru dalam perubahan sosial sekaligus perubahan ekonomi terencana, dimana tidak adanya control pesan dari pengirim maupun penerima pesan. *Keempat, ruang dan waktu*, media baru mengaburkan batas antara ruang dan waktu. McQuail memberikan karakteristik untuk membedakan media lama dengan media baru dari perspektif pengguna sebagai individu.

1. Interaktivitas (*interactivity*). Sebagaimana ditunjukkan oleh rasio respons atau inisiatif dari sudut pandang pengguna terhadap pengirim pesan.
2. Kehadiran sosial (*social presence or sociability*) , media baru bersifat individual dan bukan bersifat interaksi sosial secara langsung.
3. Kekayaan media (*media richness*). Jangkauan di mana media dapat menjembatani kerangka referensi yang berbeda, mengurangi ambiguitas, memberikan lebih banyak petunjuk, melibatkan lebih banyak indra dan lebih personal.
4. Otonomi (*autonomy*) derajat di mana seseorang pengguna merasakan kendali atas konten dan penggunaan, mandiri dari sumber.
5. Sarana permainan (*playfulness*), media baru digunakan sebagai hiburan dan kesenangan, sebagai lawan dari sifat fungsi dan alat.
6. Privasi (*privacy*). Media baru diasosiasikan dengan penggunaan dari suatu media dan atau pemilihan konten.

7. Personalisasi (personalization), tingkat dimana konten dan penggunaan menjadi personal dan unik.

Interaktivitas (interactivity) sering disebutkan sebagai sifat yang menggambarkan media baru, ia dapat memiliki makna yang berbeda dan telah ada banyak literature tentang topic (Kiousis dalam McQuail,2011:158). Kiousis tiba pada “definisi operasional” dari interaktivitas dengan merujuk pada empat indicator: kedekatan (kedekatan social dengan orang lain), aktivasi pengindraan, kecepatan yang diamati dan kehadiran jarak jauh. Dalam definisi ini, lebih banyak tergantung pada persepsi pengguna daripada kualitas media yang objektif. Downes dan McMillan (dalam McQuail,2011:158) menyebutkan lima dimensi interaktivitas sebagai berikut :

1. Arah komunikasi
2. Fleksibilitas waktu dan peran yang dipertukarkan
3. Memiliki kesadaran akan ruang dalam lingkungan komunikasi
4. Tingkat pengendalian (pada lingkungan komunikasi)
5. Tujuan yang diamati (pertukaran dan persuasi yang terarah)

1.5.7Partisipasi Politik, Media Baru dan Demokrasi

Coleman dalam McQuail (2011:165-166) menunjukkan peran media baru dalam layanan subversive dari ekspresi bebas di bawah persyaratan control otoriter alat-alat komunikasi yang tidak kalah penting. Tidak mudah bagi pemerintah untuk mengendalikan akses pada dan penggunaan internet oleh warga negara yang berbeda pendapat, tetapi juga bukannya hal tersebut tidak mungkin.

Gagasan tentang ranah public dan masyarakat sipil (civil society) yang dibahas di mana-mana telah menstimulasi gagasan bahwa media baru secara ideal sesuai untuk menempati ruang masyarakat sipil di antara ranah pribadi dan ranah kegiatan negara. Gagasan ideal tentang ranah public sebagai arena terbuka bagi percakapan public, debat dan pertukaran gagasan terlihat dapat dipenuhi oleh bentuk-bentuk komunikasi (khususnya internet/media sosial) yang memungkinkan warga negara mengekspresikan pandangan mereka dan saling berkomunikasi juga dengan para pemimpin politik mereka tanpa meninggalkan rumah masing-masing. Argumen menyambut “politik baru” yang berlandaskan media baru cukup beragam dan melibatkan perspektif yang berbeda-beda. Terdapat pandangan ‘komunitarian’ (*communitarian*) yang mengharapkan keuntungan datang dari partisipasi dan masukan akar rumput yang lebih besar dan penguatan komunitas politik lokal. Kemudian terdapat keuntungan yang dirasakan atas demokrasi keterlibatan yang dimungkinkan dengan meningkatkan teknologi untuk interaksi dan pertukaran ide dalam ranah public.

Dalam pandangan Castell (McQuail, 2011:168) jenis komunikasi yang berkembang di internet adalah yang berhubungan dengan ekspresi bebas dalam semua bentuknya. Yakni adalah sumbernya yang terbuka, kebebasan berkomentar, penyiaran yang terdesentralisasi, interaksi yang spontan yang menemukan ekspresi mereka dalam internet. Melalui gerakan sosial dengan *hashtag* #ShameOnYouSBY di media sosial Twitter merupakan upaya masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik dan mengekspresikan pandangan mereka.

1.5.8 Media Sosial

Media sosial adalah media dengan konten yang disusun dan didistribusikan melalui interaksi sosial. Media sosial dapat dikategorikan sebagai *many-to-many communications* karena khalayaknya juga menjadi sumber konten media. Beberapa media sosial adalah *facebook*, *myspace* dan *twitter* (Straubhaar, 2012: 20).

Khalayak dapat menghasilkan konten di internet didukung oleh teknologi web 2.0, yakni teknologi untuk kolaborasi dan berbagi data antara individu pengguna internet (Straubhaar, 2012: 252). Teknologi web 2.0 memungkinkan terjadinya User Generated Content (USG) yang berfokus pada partisipasi individu dan kreasi konten.

McQuail (2011: 156) mengidentifikasi lima kategori utama media baru yang sama-sama memiliki kesamaan saluran tertentu dan kurang lebih dibedakan berdasarkan jenis penggunaan, konten dan konteks. Media sosial termasuk dalam kategori media partisipasi kolektif (*collective participatory media*). Penggunaan internet sebagai ajang berbagi dan bertukar informasi, gagasan dan pengalaman, serta untuk mengembangkan hubungan pribadi yang aktif. Situs jejaring sosial (media sosial) termasuk di dalam kelompok ini.

Sementara itu Papacharissi berpendapat bahwa aktifitas politik pada masa sebelumnya hanya berada pada ranah publik, namun hari ini telah masuk pada ranah privat dengan *autonomy*, fleksibilitas dan potensi untuk berekspresi lebih besar. Media sosial seperti *twitter* telah membuat ruang privat menjadi ruang koneksi dan tanpa isolasi seperti halnya individu yang berhubungan dengan ranah politik, dan melibatkan diri dalam aktifitas pemerintahan dan sosial. Papacharissi dalam Fuchs, 2013:186). Dia mengatakan bahwa sosial media seperti

twitter telah mengaburkan batas-batas antara ruang privat dan ruang publik politik sehingga ruang privat menjadi bagian ranah politik.

1.5.9 Karakteristik Media Sosial *Twitter*

Media sosial twitter banyak digunakan karena bersifat tanpa biaya dan mudah digunakan untuk mengirim pesan (Cross, 2011: 51). Pengguna twitter cukup melakukan sign up, mem-posting profil dan log in. Dalam halaman utama terdapat kotak bertuliskan, “*what’s happening?*”. Kemudian pengguna menuliskan maksimal 140 karakter dalam kotak tersebut. Lalu tulisan tersebut akan dapat dibaca oleh publik, meliputi followers dan siapapun yang memiliki akses internet. Jika pengguna twitter ingin menyampaikan pesan privat maka direct message dapat digunakan (Cross, 2011: 55).

Beberapa fitur dalam media sosial twitter adalah:

1. Update status

Penggunaan twitter menurut riset Social Media at Work dilakukan untuk melakukan update status (apa yang sedang terjadi) sebanyak 50 persen. Sebanyak 39 persen menyatakan untuk mem-follow selebritis, dan lainnya sebanyak 39 persen ikut arus. Selanjutnya sebanyak 30 persen menggunakan twitter untuk tetap terkoneksi dengan teman (Cross, 2011: 65).

2. Follow

Media sosial twitter memiliki sifat relasi asimetris. Akun twitter tidak harus menjalin hubungan timbal balik (resiprok) dengan akun lain, dalam arti jika suatu akun melakukan *follow* pada akun lain, maka akun lain tersebut tidak harus melakukan *follow* juga. Berbeda dengan facebook yang bersifat simetris, dalam

arti relasi antar akun adalah relasi sebagai teman (*friend*), bukan *follow* (Postill, 2012: 7).

3. *Retweet*

Dalam twitter pengguna dapat melakukan retweet informasi, link, atau komentar orang lain yang menarik.

4. *Reply*

Umpan balik dimungkinkan bersifat instan. Twitter seperti ruang percakapan raksasa yang memungkinkan terkoneksi dengan teman dan followers untuk mengetahui apa yang sedang terjadi setiap saat. Ruang 40 karakter dalam twitter merupakan tantangan bagi penggunanya untuk dapat menyampaikan pesan secara singkat (Cross, 2011: 51).

5. *Hashtag*

Selain itu penggunaan hashtag dalam twitter mengarahkan pada diskusi mengenai topik tertentu. Dalam twitter juga terdapat '*trending topic*' mengenai *hashtag* yang sedang populer (Cross, 2011: 55).

Solis dalam Postill (2012: 9) menjelaskan dalam media sosial *twitter* terdapat fasilitas *hashtag* (tagar) yang memungkinkan percakapan kelompok melalui *timeline* yang terorganisir. Informasi dalam *twitter* dengan tema tertentu dapat dieksplorasi melalui tagar spesifik.

1.6 Asumsi Penelitian

Twitter menjadi media sosial yang semakin populer dan efisien untuk berhubungan dengan orang lain dalam waktu singkat. Twitter juga merupakan

medium yang tepat untuk melakukan gerakan sosial nonfisik. Awalnya, banyak orang menyangsikan media sosial mampu mendorong perubahan sosial Indonesia. Namun, prediksi tersebut ternyata meleset. Salah satu contohnya ialah dengan munculnya hashtag #ShameOnYouSBY sebagai ungkapan kekecewaan publik atas hasil sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang meloloskan mekanisme bahwa pilkada dilakukan melalui DPRD. Teori Ruang Publik dapat menjelaskan bagaimana media sosial ini telah memberikan ruang bagi publik untuk melakukan interaktivitas dan gerakan kolektif dalam memberikan pandangan-pandangan mereka sebagai upaya melakukan perlawanan kepada pemegang otoritas ketika terjadi ketidakadilan. Di Indonesia, penggunaan media sosial untuk gerakan sosial semakin banyak, karena media sosial dianggap bisa menjadi sebuah alat untuk melakukan perubahan dan demokrasi. Gerakan sosial pada media sosial cenderung cepat, ramping dan banyak. Dengan kata lain, gerakan sosial yang dilakukan pada media sosial terlihat beberapa menit dan dengan cepat menghilang tanpa arah.

1.7Operasional Konsep

A. Media Sosial

Media sosial adalah media dengan konten yang disusun dan didistribusikan melalui interaksi sosial. Media sosial dapat dikategorikan sebagai *many-to-many communications* karena khalayaknya juga menjadi sumber konten media. Beberapa media sosial adalah *facebook*, *myspace* dan *twitter* (Straubhaar, 2012: 20). Dalam penelitian ini akan mengkaji khusus dalam media sosial *twitter*. *Twitter* adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim

dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Pengguna media sosial *twitter* disebut akun.

B. Gerakan Sosial

Saat ini penggunaan media baru untuk gerakan sosial semakin banyak, karena media baru dianggap bisa menjadi alat untuk melakukan perubahan dan demokrasi. Interaktivitas telah menjadi salah satu nilai tambah karakteristik media baru. Dimana media lama (*old media*) menawarkan konsumsi pasif, sedangkan media baru menawarkan interaktivitas. Hal ini merupakan salah satu kunci mengapa media baru dapat digunakan untuk menggerakkan sebuah perubahan (gerakan sosial).

C. Ruang Publik

Ruang publik merupakan wilayah dimana setiap orang bebas masuk dan turut berbicara tanpa ada tekanan koersif yang mengarah pada kesepakatan pragmatis. Pada perkembangan selanjutnya ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik, seperti lapangan, warung kopi dan salon, tetapi juga ruang di mana proses komunikasi bisa berlangsung, seperti media baru (internet) di era saat ini.

D. Ideologi Perlawanan

Ideologi adalah keyakinan dasar yang dimiliki oleh sebuah kelompok dan dihayati bersama oleh seluruh anggota kelompok. Sedangkan resistensi diartikan sebagai aksi atau tindakan yang dimaknai sebagai perlawanan yang real dengan aksi kecil-kecilan, insidental bahkan dianggap sebagai gejala sekunder suatu kejahatan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model theo Van Leeuwen. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang bertujuan untuk meneliti fenomena sosial yang kompleks melalui bahasa. Bahasa di sini tidak diteliti secara rigid sebagaimana dalam penggunaan pendekatan bahasa yang lainnya. Analisis wacana kritis meneropong ideologi yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa. Ideologi merupakan kajian sentral dalam analisis wacana kritis. Hal ini menurut Eriyanto (2001:13) karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu..

Pada umumnya, kritik bertujuan untuk mengungkap struktur kekuasaan dan membongkar ideologi tertentu. Ideologi dalam konteks analisis wacana kritis merupakan kepercayaan sehari-hari yang bersifat tersembunyi dan laten. Kepercayaan ini kemudian muncul dengan menyamakan diri dalam metafora dan analogi konseptual (Lakoff dan Johnson dalam Wodak dan Meyer, 2001:8).

Dalam studi analisis teks, paradigma kritis terutama berpandangan bahwa berita bukanlah sesuatu yang netral, dan menjadi ruang publik dari berbagai pandangan yang berseberangan dalam masyarakat. Begitu juga teks *tweet* yang diproduksi oleh masyarakat. Selain itu, menurut Wodak dan Meyer (2001:20), analisis wacana kritis mengemukakan asumsi bahwa semua wacana bersifat *historical* dan oleh karena itu dapat dipahami dengan cara mereferensikan pada konteksnya, misalnya saja penggunaan faktor-faktor seperti *culture*, *society*, dan

ideology yang kemudian dikaitkan dengan penggunaan bahasa. Secara operasional, penelitian ini berusaha menggambarkan proses analisis wacana kritis mengenai teks/bahasa dalam gerakan sosial melalui *hashtag* #ShameOnYouSBY di media sosial twitter.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu akun-akun yang menggunakan *hashtag* #ShameOnYouSBY, yang mencakup teks dalam *tweetyang* disertai *hashtag* #ShameOnYouSBY.

1.8.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks kata-kata tertulis dalam *tweetyang* menggunakan *hashtag* #ShameOnYouSBY.

1.8.4 Sumber Data

1.8.4.1 Data Primer

Data utama yang diperoleh secara langsung dari kumpulan teks *tweetakun* yang menggunakan *hashtag*#ShameOnYouSBY saat menjadi *trending topic* pada 26-28 September 2014.

1.8.4.2 Data Sekunder

Merupakan referensi penunjang berupa tulisan/gambar. Data ini merupakan studi literatur tentang kajian analisis wacana kritis yang mana data diperoleh dari buku, jurnal penelitian, artikel di internet maupun media cetak.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan peneliti berdasarkan kebutuhan analisa dan pengkajian. Pengumpulan data tersebut sudah dilakukan sejak peneliti menentukan permasalahan yang sedang dikaji, pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- Pengamatan dilakukan pada lini masa Twitter melihat kecenderungan orang-orang untuk memperbarui status dengan menggunakan *hashtag* #ShameOnYouSBY pada saat *hashtag* ini menjadi trending topic di *Twitter*.
- Pengumpulan data berupa teks pada lini masa Twitter yang menggunakan *hashtag* #ShameOnYouSBY selama periode 26-28 September 2014 saat masih menjadi *trending topic Twitter*. Mengingat penelitian yang dilakukan adalah analisis terhadap teks *tweet* di *Twitter*, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan, kemudian dikategorikan berdasarkan konteks-konteks yang muncul selama pengamatan peneliti. Dalam hal ini Arikunto (2002:117), menjelaskan bahwa teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan karena keterbatasan peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih besar atau jauh, keterbatasan tersebut seperti waktu, tenaga dan dana. Walaupun begitu, dikarenakan teknik pengambilan sampel ini dapat dikatakan lemah, Arikunto (2002:117) menegaskan bahwa teknik pengambilan sampel ini dapat diperkuat dengan syarat-syarat (a) Pengambilan sampel harus didasarkan dengan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik

tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi yang dalam penelitian ini adalah *tweet* yang menggunakan *hashtag* #ShameOnYouSBY dan mendapatkan retweet. (b) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjects*). (c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Dengan demikian, teknik pengambilan sampel bertujuan ini dirasakan sangat tepat digunakan untuk penelitian analisis wacana teks yang peneliti lakukan. Penelitian pustaka (*library research*), dengan mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan, untuk mendukung analisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa digambarkan.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen (1996:32-69) yang dikenal dengan model analisis representasi aktor sosial. Secara khusus van Leeuwen mengungkapkan bahwa bahasa adalah cerminan ideologi, sehingga dengan mempelajari bahasa yang tercermin dalam teks, ideologi dapat dibongkar.

Analisis Van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor (seseorang atau kelompok) ditampilkan dalam teks. Ada dua pusat perhatian. Pertama, proses eksklusi (*exclusion*). Apakah dalam suatu teks, ada

kelompok atau aktor yang dimunculkan dalam teks dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu. Proses memunculkan aktor ini, secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak mengenai suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu.

Kedua, proses inklusi (*inclusion*). Kalau Exclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana proses suatu kelompok dikeluarkan dalam teks, maka inklusi berhubungan dengan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok ditampilkan lewat teks. Baik proses eksklusi maupun inklusi tersebut menggunakan apa yang disebut strategi wacana. Dengan memakai kata, kalimat, informasi atau susunan bentuk kalimat tertentu, cara bercerita tertentu, masing-masing kelompok direpresentasikan dalam teks. Di bawah ini uraian dari persoalan tersebut.

1.8.6.1 Eksklusi

Menurut Theo Van Leeuwen, ada beberapa strategi bagaimana suatu aktor (seseorang atau kelompok) dikeluarkan dalam pembicaraan. Diantaranya sebagai berikut.

a) Pasivasi

Eksklusi adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya ini adalah proses bagaimana suatu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya. Menurut Van Leeuwen, kita perlu mengkritisi bagaimana masing-masing kelompok itu ditampilkan dalam teks, apakah ada pihak atau aktor yang dengan strategi wacana tertentu hilang dalam teks.

b) Nominalisasi

Nominalisasi merupakan strategi wacana lain yang sering dipakai untuk menghilangkan kelompok atau aktor sosial tertentu. Sesuai dengan namanya, strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Hal tersebut umumnya dilakukan dengan menggunakan imbuhan “pe-an” Nominalisasi dapat menghilangkan aktor atau subjek dalam pemberitaan karena berhubungan dengan transformasi dari kalimat aktif. Bentuk kalimat aktif selalu membutuhkan subjek. Kalimat aktif juga selalu berbentuk kata kerja yang merujuk pada apa yang dilakukan oleh subjek (proses).

c) Penggantian anak Kalimat

Penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor.

1.8.6.2 Inklusi

Ada beberapa macam strategi wacana yang dilakukan ketika sesuatu, seseorang atau kelompok orang ditampilkan dalam teks. Van Leeuwen menjelaskan sebagai berikut:

a) Diferensiasi-Indiferensiasi

Suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri, sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat secara kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks. Hadirnya (*Inclusion*) peristiwa atau kelompok lain selain yang diberitakan itu, menurut Van Leeuwen bisa menjadi penanda yang baik bagaimana suatu kelompok atau peristiwa direpresentasikan dalam

teks. Penghadiran kelompok atau peristiwa lain secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa kelompok itu tidak baik dibandingkan kelompok lain. Ini merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan dengan menghadirkan kelompok atau wacana lain yang dipandang lebih dominan atau lebih bagus.

b) Objektivasi-Abstraksi

Elemen wacana ini berhubungan dengan informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret.

c) Nominasi-kategorisasi

Dalam suatu teks atau pemberitaan mengenai aktor (seseorang atau kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, sering terjadi pilihan antara menampilkan aktor tersebut apa adanya atau mengkategorisasikan aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa macam-macam yang menunjukkan ciri penting dari seseorang bisa berupa agama, status, bentuk fisik dan sebagainya. Kategori itu sebetulnya tidak penting karena umumnya tidak akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada khalayak.

d) Nominasi-Identifikasi

Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni suatu kelompok, peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. Perbedaannya dengan identifikasi yaitu proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Di sini, ada dua proposisi, proposisi kedua yakni sebagai penjelas atau keterangan dari proposisi

pertama yang umumnya dihubungkan dengan kata hubung seperti; yang, di mana. Proposisi kedua ini dalam kalimat posisinya sebetulnya murni sebagai penjelas atau identifikasi atas sesuatu. Pembuat teks mungkin ingin memberikan penjelas “siapa” seseorang itu atau “apa” tindakan atau peristiwa. Akan tetapi, hal ini harus dikritisi karena pemberian penjelas ini menyugestikan makna tertentu yang umumnya berupa penilaian atas seseorang atau kelompok atau tindakan tertentu. Ini merupakan strategi wacana di mana satu orang, kelompok atau tindakan diberi penjelasan yang buruk sehingga ketika diterima oleh khalayak akan buruk pula.

e) Determinasi-Indeterminasi

Dalam teks atau pemberitaan, aktor atau peristiwa sering disebutkan secara jelas tetapi sering juga tidak jelas (anonim). Anonimitas ini bisa jadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menulis, sehingga lebih aman untuk menulis anonim atau bisa juga karena ada ketakutan struktural jika kategori yang jelas dari seorang aktor tersebut muncul dalam teks. Apapun alasannya, dengan bentuk anonimitas ini ada kesan yang berbeda ketika diterima oleh khalayak. Menurut Van Leeuwen anonimitas ini membuat suatu generalisasi yang tidak spesifik.

f) Asimilasi-Individualisasi

Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya ataukah tidak. Asimilasi terjadi ketika dalam teks atau pemberitaan bukan kategori aktor

sosial yang spesifik yang disebut dalam teks tetapi komunitas atau kelompok sosial mana seseorang tersebut berada.

g) Asosiasi-Disosiasi

Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri atautkah ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Elemen asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau aktor sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau kelompok lain yang lebih luas.

Theo van Leeuwen membangun suatu model yang secara umum menggambarkan bagaimana aktor ditampilkan dalam teks. Van Leeuwen amat peka dengan kemungkinan marjinalisasi atau pengucilan (seseorang atau kelompok) dalam teks. Menurut van Leeuwen ada dua hal yang harus diperhatikan ketika kita memeriksa aktor sosial dalam suatu teks. Pertama, eksklusi yaitu aktor sosial dalam teks tersebut apakah disembunyikan atau dihilangkan dan strategi yang digunakan. Dampak dari pengeluaran atau penghilangan aktor bermacam-macam di antaranya yakni dapat melindungi subjek atau pelaku dalam suatu teks. Kedua, inklusi; yakni aktor (seseorang atau kelompok) yang disebut masuk dan digambarkan dalam teks atau pemberitaan. Meskipun aktor tidak dihilangkan, proses marjinalisasi seseorang atau kelompok tertentu tetap bisa dilakukan. Van Leeuwen memberikan serangkaian strategi wacana yang dapat dipakai sedemikian rupa sehingga mempengaruhi makna yang sampai ke tangan pembaca. Secara umum yang ingin dilihat dari model analisis Theo van Leeuwen ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Proses Eksklusi dan Inklusi

| Teknik | Yang ingin dilihat |
|---------|--|
| Ekklusi | a) Apakah ada penghilangan aktor dalam teks? b) Apakah ada upaya media untuk hanya mengedepankan aktor dan menghilangkan aktor lain? c) Apa efek dari penghilangan tersebut? d) Bagaimana strategi yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menghilangkan aktor sosial tersebut? e) Apakah strategi tersebut dilakukan secara sengaja? f) Ataukah melewati suatu proses yang tidak disadari oleh penulis? |
| Inklusi | a) Bagaimana para aktor ditampilkan dalam teks? b) Dengan strategi apa pamarjinalan atau pengucilan para aktor dilakukan? c) Bagaimana aktor digambarkan dalam teks? d) Apakah penggambaran tersebut berkaitan dengan proses marjinalisasi aktor tertentu dalam pemberitaan? e) Bila ya, dilakukan dengan strategi apa? |

Sumber: Eriyanto (2009:192-193)

Tahapan penelitian dalam penelitian ini hanya terbatas pada analisis teks saja sesuai dengan model analisis wacana kritis theo van Leeuwen, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| Dimensi | Metode | |
|--|--|--|
| Analisis Teks | <i>Critical Linguistic</i> (dengan menggunakan pendekatan Model Van Leeuwen) | |
| | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><u>INKLUSI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasivasi • Nominalisasi • Penggantian Anak kalimat </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><u>EKSLUSI:</u></p> <p>Diferensiasi-Indeferensiasi Objektivasi-Abstraksi Nominasi-Kategorisasi Nominasi-Identifikasi Determinasi-Indeterminasi Asimilasi-Individualisasi Asosiasi - Disosiasi</p> </td> </tr> </table> | <p><u>INKLUSI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasivasi • Nominalisasi • Penggantian Anak kalimat |
| <p><u>INKLUSI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasivasi • Nominalisasi • Penggantian Anak kalimat | <p><u>EKSLUSI:</u></p> <p>Diferensiasi-Indeferensiasi Objektivasi-Abstraksi Nominasi-Kategorisasi Nominasi-Identifikasi Determinasi-Indeterminasi Asimilasi-Individualisasi Asosiasi - Disosiasi</p> | |

1.8.7 Kualitas Data

Menurut Guba dan Lincoln, *goodness criteria* (atau *quality criteria*) merupakan perbedaan mendasar yang ada antara paradigma-paradigma penelitian yang mengakar pada pertanyaan ontologi, epistemologi dan metodologi. Dalam paradigma kritis, kualitas data dalam penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) kriteria (Guba dan Lincoln, 2000:170; Conrad dan Serlin, 2011:267). Pertama, *Historical situadness*, yang merupakan ktiteria yang mana sebuah penelitian kritis akan mempertimbangkan nilai-nilai pembentuk realitas yaitu nilai sosial, politik, kultural, ekonomi, etnis dan gender. Kedua, *Erosion of ignorance and misapprehensions*, yang merupakan kriteria yang mempertimbangkan bagaimana realitas yang terbentuk mampu mengikis ketidaktahuan (atau kebodohan) serta kesalah-pengertian yang terjadi dalam konteks sejarah. Kriteria ini merupakan bagian dari analisis penelitian yang memperlihatkan pengembangan teori sebagai usaha untuk membongkar dan menguraikan persoalan-persoalan yang dimunculkan di masa lampau.

Ketiga, *Action stimulus*, yaitu kriteria yang mempertimbangkan sejauh mana kedua kriteria sebelumnya mampu menstimulasikan tindakan-tindakan yang baik yang mengarah pada transfromasi sosial, persamaan, dan keadilan sosial. Kriteria ini dinilai dalam wujud implikasi penelitan yang berefleksi terhadap realitas yang dibentuk oleh sejarah dan masa kini.

1.8.8 Keterbatasan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini tidak bisa ditetapkan sebagaimana dalam penelitian biasa, karena internet bukan ruang sosial yang memiliki batasan tegas. Selanjutnya, data di internet bersifat tidak konkrit karena tidak berupa '*hardcopy*'

di kertas seperti dalam buku. *Database* di internet dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan bisa hilang, sehingga diperlukan pemantauan dalam penelitian dalam jangka waktu harian. Selain itu orang-orang di internet dengan mudah berganti identitas, sesuai dengan karakter komunikasi di internet yang bersifat anonim.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan teoritis dan keterbatasan metodologis. Penggunaan analisis wacana kritis yang menggunakan model Theo van Leeuwen yang tidak bisa mengungkap seluruh fenomena yang terjadi dalam gerakan sosial melalui *hashtag* di twitter, karena hanya terbatas pada analisa teks saja.